



KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas kekuatan-Nya penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, merupakan hasil kerjasama antara bidang terkait di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.

Catatan Laporan Keuangan (CALK) tersebut memuat beberapa item laporan seperti :

- a. Neraca tahun 2020 dan tahun 2019;
- b. Laporan Perubahan Ekuatas;
- c. Laporan Realisasi Anggaran;
- d. Laporan Operasional.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ini kami sampaikan, semoga dapat berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam rangka Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Tahunan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih, atas bantuan berbagai pihak untuk membantu dalam penyusunan laporan ini sehingga dapat selesai.

Kasongan, 30 Juni 2021

KEPALA DINAS,

Drs. MUHAMMAD HASRUN,MM,M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19610918 198803 1 012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
Bab I PENDAHULUAN	3
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan SKPD	3
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD	4-5
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	6-7
Bab II INFORMASI UMUM	8
2.1 Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi OPD	8-11
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi OPD	12-32
Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	33
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	33-34
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	35
Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	36-40
Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	41
5.1 Neraca	41-42
5.1.1 Aset	43-49
5.1.2 Kewajiban	49-50
5.1.3 Ekuitas	51
5.2 Laporan Perubahan Ekuitas	51
5.2.1 Perubahan Ekuitas	51
5.3 LRA	52
5.3.1 Pendapatan_LRA	52
5.3.2 Belanja	52-55
5.4 LO	55
5.4.1 Pendapatan_LO	55-56
5.4.2 Beban	56-57
5.4.3 Kegiatan Non Operasional	57
5.4.4 Pos Luar Biasa	57
Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN DI LUAR ANTAR MUKA LAPORAN KEUANGAN UTAMA	58
6.1 Penerimaan dan Belanja Dana Lainnya di Luar APBD	58
Bab VII PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	59
Bab VIII PENUTUP	60-61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN **Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2020**

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi melakukan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari : laporan realisasi anggaran, neraca ,dan catatan atas laporan keuangan (*Notes of the Financial Statement*), yang kemudian akan dilakukan konsolidasi oleh Bagian Keuangan sebagai entitas pelaporan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang meliputi : laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas (*cash flow*) serta catatan atas laporan keuangan.

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan selain sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Hal yang paling mendasar dalam laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna utama, dan menjelaskan berbagai kebijakan pengelolaan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dicapai serta juga sebagai perwujudan dari sebuah transparansi, akuntabilitas pemerintah daerah terhadap publik.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Landasan Hukum Dalam Penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2019 ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);



12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan untuk Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;



1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

BAB II INFORMASI UMUM

- 2.1 Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi;
- 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi OPD.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis penyusunan yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Neraca
 - 5.1.1 Aset;
 - 5.1.2 Kewajiban;
 - 5.1.3 Ekuitas
- 5.2 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.2.1 Perubahan Ekuitas
- 5.3 LRA
 - 5.3.1 Pendapatan LRA
 - 5.3.2 Belanja
- 5.4 Pendapatan-LO
 - 5.4.1 Pendapatan LO
 - 5.4.2 Beban;
 - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional;
 - 5.4.4 Pos Luar Biasa

**BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI DI LUAR ANTAR
MUKA LAPORAN KEUANGAN UTAMA**

- 6.1 Penerimaan dan Belanja Dana Lainnya di Luar APBD
 - Menjelaskan lebih lanjut apabila OPD ada Menerima dana/barang yang bersumber dari luar APBD, misalnya hibah dan lain-lain yang tidak dianggarkan di APBD.

BAB VII PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VIII PENUTUP.



BAB II

INFORMASI UMUM

2.1 Dasar Pendirian dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdirinya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan pada tahun 2016 akhir, yang berdasarkan “Peraturan Bupati Katingan Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Katingan “

Profil Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan

- Gambaran Umum

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor: 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan terurai sebagai berikut :

(1) Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, terdiri dari

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang terdiri dari :
 1. Kepala Bidang Teknologi Informatika Eselon IIIb;
 - a. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informatika Eselon IVa;
 - b. Kepala Seksi E-Government Informatika Eselon IVa;
 - c. Kepala Seksi Telekomunikasi dan Keamanan Teknologi Informatika Eselon IVa;
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Eselon IIIb
 - a. Kepala Seksi Layanan Komunikasi Publik Eselon IVa;
 - b. Kepala Seksi Kehumasan Eselon IVa;



- c. Kepala Seksi KemitraanKomunikasiPublik Eselon IVa;
3. Kepala Bidang PengelolaanInformasiPublikEselon IIIb;
 - a. Kepala Seksi PengelolaanOpini PublikEselon IVa;
 - b. Kepala Seksi PengendalianInformasi Publik Eselon IVa;
 - c. Kepala Seksi MediaPublik Esselon IVa;
4. Kepala Bidang Persandian, dan Statistik Eselon IIIb
 - a. Kepala Seksi TataKelolaKeamananInformasi Pemerintahan Eselon IVa;
 - b. Kepala Seksi OerasionalPengamananSandi Eselon IVa;
 - c. Kepala Seksi Statistik SektoralEselon IVa
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan terdiri dari :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Eselon IIb;
2. Sekretaris Dinas Eselon IIIa;
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Eselon IVa;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan Eselon IVa;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Eselon IVa
3. Kepala Bidang Teknologi Informatika Eselon IIIb;
 - a. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informatika Eselon IVa;
 - b. Kepala Seksi E-Government Informatika Eselon IVa;
 - c. Kepala Seksi TelekomunikasidanKemanan Teknologi Informatika Eselon IVa;
4. Kepala Bidang PengelolaanKomunikasiPublik Eselon IIIb
 - a. Kepala Seksi Layanan Komunikasi Publik Eselon IVa;
 - b. Kepala Seksi Kehumasan Eselon IVa;
 - c. Kepala Seksi KemitraanKomunikasiPublik Eselon IVa;
5. Kepala Bidang PengelolaanInformasiPublikEselon IIIb;
 - a. Kepala Seksi PengelolaanOpini PublikEselon IVa;
 - b. Kepala Seksi PengendalianInformasi Publik Eselon IVa;
 - c. Kepala Seksi MediaPublik Esselon IVa;



6. Kepala Bidang Persandian, dan Statistik Eselon IIIb
 - a. Kepala Seksi Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintahan Eselon IVa;
 - b. Kepala Seksi Operasional Pengamanan Sandi Eselon IVa;
 - c. Kepala Seksi Statistik Sektoral Eselon IVa.

Tenaga personalia pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per tahun 2020 cukup memadai, hal tersebut dapat dilihat dengan beragamnya jenjang pendidikan, seperti pada tabel di bawah.

Tabel 1
Data Pegawai Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Katingan Menurut Tingkat Pendidikan per 30 Desember
2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2/ Pasca Sarjana	4 Orang
2	S1/ Sarjana	18 Orang
3	D III/ Diploma	3 Orang
4	SLTA	4 Orang
5	SLTP	1 Orang

Tabel 2
Data Tenaga Honor/ kontrak Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Kabupaten Katingan Menurut Tingkat Pendidikan per 30
Desember 2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S1/ Sarjana	8 Orang
2	D III	1 Orang
3	SLTA	6 Orang
4	SLTP	0 Orang



VISI

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

“ Katingan Bermartabat “ untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Berbudaya, Maju, Religius, Terintegrasi, Berkesinambungan dan Terbuka.

MISI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana di Bidang Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik;
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik;
4. Meningkatkan Kerjasama Antara Masyarakat, Swasta maupun Media Massa dalam Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informatika kepada Masyarakat;
6. Mengoptimalkan Penerapan E-Government.



2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai Tugas Pokok menyusun dan melaksanakan kewenangan/kebijakan Otonomi Daerah Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi , Informatika, Persandian, dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi , Informatika, Desiminasi dan Informasi, Persandian, Pengelolaan Data Elektronik dan Statistik;
- b. Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Program di Bidang Komunikasi , Informatika, Desiminasi dan Informasi, Persandian, Pengelolaan Data Elektronik dan Statistik;
- c. Pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan data elektronik;
- d. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang pos dan telekomunikasi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi daerah;
- f. Pengawasan/pengendalian terhadap seluruh penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten Katingan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- g. Pelaksanaan pembangunan jaringan komunikasi data seluruh sistem pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
- h. Pelaksanaan penyusunan serta penyiapan aplikasi sistem informasi manajemen;
- i. Pelaksanaan pengembangan E-Government dan pemberdayaan telematika;
- j. Pemberian pertimbangan teknis komputerisasi manajemen kepada Perangkat Daerah;
- k. Penyuluhan di Bidang Telekomunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik;
- l. Pelaksanaan penertiban jasa titipan untuk kantor agen dalam pelayanan Pos;
- m. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
- n. Pemberian dan pencabutan perizinan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangannya;
- o. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di Bidang Telekomunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;



- q. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- s. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah dalam penyelenggaraan dibidang statistik;
- t. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- u. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- v. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- w. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- x. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapatan pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- y. Pengelolaan pengaduan masyarakat di Bidang Telekomunikasi dan informatika;
- z. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
 - aa. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - bb. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
 - cc. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - dd. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

1. Pendapatan Daerah

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan dalam Tahun Anggaran 2019 Pendapatan Daerah ditargetkan Rp. 166.000.000,00,- Realisasi Rp. 0,-

Sebab Realisasi sampai saat ini Rp. 0,- di karenakan Dasar Payung Hukum untuk penarikan Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi sampai sa'at ini belum ada serta dari OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandaian dan Statistik beberapa kali mengusulkan RAPERDA nya sampai saat ini PERDA nya tidak ada turun ke OPD kami.

2. Belanja Daerah

Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan dalam Tahun Anggaran 2020 Pagu Anggaran ditargetkan menjadi Rp. 8.956.453.796,00 realisasinya mencapai sebesar Rp. 7.564.739.793,00 atau sebesar 84,46% dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja langsung

- Belanja Pegawai realisasinya sebesar Rp. 391.055.000,00 dari target anggaran sebesar Rp. 498.960.000,00 atau sebesar 78,37%.
- Belanja Barang dan Jasa realisasinya sebesar Rp. 3.840.984.441,00 dari target anggaran sebesar Rp. 4.005.138.375,00 atau sebesar 95,90%.
- Belanja Modal realisasinya sebesar Rp. 112.359.000,00 dari target anggaran sebesar Rp.815.190.000,00 atau sebesar 13,78%.



B. Belanja tidak langsung

- Belanja Pegawai realisasinya sebesar **Rp. 3.220.341.352,00** dari target anggaran sebesar **Rp. 3.637.165.421,00** atau sebesar **88,54%**.

C. Surplus/Defisit Anggaran terealisasi sebesar (**Rp. 7.564.739.793,00**) dari target (**Rp. 8.956.453.796,00**) atau sebesar (84,46 %).

D. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 0,00

E. Pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp. 7.564.739.793,00

F. Sisa Lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun berkenaan terealisasi sebesar **Rp. 1.391.714.003,00**

Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
5	Belanja	8.956.453.796,00	7.564.739.793,00	84,46
5.1	Belanja Tidak Langsung	3.637.165.421,00	3.220.341.352,00	88,54
5.1.1	Belanja Pegawai	3.637.165.421,00	3.220.341.352,00	88,54
5.2	Belanja Langsung	5.319.288.375,00	4.344.398.441,00	81,67
5.2.1	Belanja Pegawai	498.960.000,00	391.055.000,00	78,37
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	4.005.138.375,00	3.840.984.441,00	95,90
5.2.3	Belanja Modal	815.190.000,00	112.359.000,00	13,78
Jumlah 5.1 + 5.2		8.956.453.796,00	7.564.739.793,00	84,46

Dari gambaran di atas terlihat bahwa masing-masing jenis belanja tidak melampaui kredit anggaran, atau terealisasi sebesar 84,46%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian target yang mana tolak ukurnya adalah perbandingan antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi. Beberapa hambatan yang menjadi kendala baik pendapatan maupun belanja tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

A. Bidang Pendapatan

Tahun Anggaran 2020 sementara ini Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ditarget untuk pendapatan sebesar Rp. 166.000.000,00 dan sampai saat ini tidak terealisasi atau Rp. 0,00 disebabkan Dasar Payung Hukumnya atau PERDA nya tidak ada, sehingga realisasinya 0,00 %.

B. Bidang Belanja

1. Kurang matangnya dalam setiap Bidang merencanakan Program dan Kegiatan Anggaran sehingga terdapat beberapa pos rekening belanja atau pendapatan yang seharusnya dianggarkan untuk tolak ukur capaian realisasi, sehingga sebagian besar tidak dapat dilaksanakan.
2. Kurangnya Koordinasi dan Konsolidasi antara Bendahara Pengeluaran dengan PPTK dan Atasan (Kepala Dinas) selaku penanggung jawab kegiatan yang seharusnya dapat melaksanakan dan merealisasikan suatu kegiatan secara baik.
3. Lambatnya proses kegiatan yang dilaksanakan sebahagian PPTK sehingga menyebabkan penyerapan Anggaran tidak sesuai yang diharapkan sampai saat ini.
4. Adanya Pandemi Covid -19 yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah Kabupaten Katingan sudah mengarah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Maka dari spesialisasi tugas dan tanggung jawab di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan OPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan OPD yang disampaikan kepada BPAKD sebagai entitas pelaporan untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan Pedoman Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diatur kembali oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Anggaran 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan yaitu :

- a. **Basis Akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian. Kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas dana.
- b. **Transaksi Penerimaan Kas** atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
- c. **Bagian Kas** Untuk Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah. Entitas Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba/rugi, tapi diakui sebagai sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban selain kas seperti bantuan, hibah dan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran).

- d. **Basis Akrual** Untuk Neraca berarti bahwa aktiva, utang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Prinsip Nilai Perolehan (*historical cost principle*);

- a. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat di verifikasi.

2. Prinsip Realisasi (*realization principle*);

- a. Pendapatan yang tersedia yang telah di otorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

3. Prinsip Substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas

4. Prinsip Periodisitas (*Periodicity principle*);

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

5. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

6. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau pencatatan atas laporan keuangan.

7. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*)

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

Sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Katingan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan peraturan tentang pengelola keuangan daerah yang lainnya. Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan keuangan. Kebijakan yang diambil tersebut



sekurang kurangnya memuat :

- a. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
- b. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1. NERACA

Neraca tersaji per 30 Desember 2020 sebagai berikut:

U R A I A N	SALDO 2020	SALDO 2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Serta Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban di Bayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi Dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	344.300.000,00	457.601.800,00



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN KATINGAN**

Peralatan dan Mesin	6.221.824.845,00	6.053.563.845,00
Gedung dan Bangunan	6.762.385.620,00	6.649.083.820,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	775.341.700,00	775.341.700,00
Aset Tetap Lainnya	29.999.400,00	29.999.400,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.948.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(5.653.119.491,03)	(4.708.758.142,22)
ASET TETAP	8.505.680.073,97	9.256.832.422,78
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.979.456,12	8.083.768,23
Aset Lainnya	33.214.509.000,00	33.245.320.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	33.220.488.456,12	33.253.403.768,23
JUMLAH ASET	41.726.168.530,09	42.510.236.191,01
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	41.726.168.530,09	42.510.236.191,01
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	41.726.168.530,09	42.510.236.191,01

5.1.1 Aset

Aset terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya, berikut realiasi dan rinciannya :

A. Aset Lancar

1. Kas Bendahara Penerimaan dan Kas Bendahara Pengeluaran

a. Kas Bendahara Penerimaan

Saldo kas di bendahara penerimaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

b. Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

c. Kas di BLUD

Saldo kas lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

d. Kas Lainnya

Saldo kas lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

2. Piutang Lain-lain

Saldo piutang lain-lain pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan Per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 sedangkan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

3. Persediaan



Persediaan barang pakai habis pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 terdapat Penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.

Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut :

U r a i a n	Jumlah	
	Tahun 2020	Tahun 2019
Aset Lancar :		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar	0,00	0,00

Seluruh persediaan berasal dari Pengadaan OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan dengan rincian sebagai berikut :



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN KATINGAN**

No	Nama Barang	Nilai persediaan per 31 Desember 2020	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HVS Folio	0,00	rim
2	HVS Kuarto	0,00	rim
3	HVS A3	0,00	rim
4	Kertas Sampul	0,00	rim
5	Kertas Komputer 4 fly	0,00	bok
6	Buku Folio Register	0,00	buah
7	Buku Kas Pembantu	0,00	buah
8	Buku Agenda Surat	0,00	buah
9	Buku Kas Jurnal	0,00	buah
10	Map Ordner	0,00	buah
11	Stopmap Folio	0,00	buah
12	Map Snelhecter plastik	0,00	buah
13	Map Batik	0,00	buah
14	Amlop Dinas Casing B	0,00	pak
15	Amlop Dinas Casing C	0,00	pak
16	Pelobang Kertas	0,00	buah
17	Paper Klip	0,00	kotak
18	Binder Klip Kecil	0,00	kotak
19	Binder Klip Sedang	0,00	kotak
20	Binder Klip Besar	0,00	kotak
21	Staples Kecil	0,00	buah
22	Staples tanggung	0,00	buah
23	Isi Staples Kecil	0,00	kotak
24	Isi Staples tanggung	0,00	kotak
25	Pembuka isi Staples	0,00	buah
26	Lem Putih setara fox	0,00	buah
27	Lakban hitam ukuran sedang	0,00	buah
28	Lakban hitam ukuran kecil	0,00	buah
29	Catrid Printer canon 811 (warna)	0,00	kotak
30	Catrid Printer canon 810 (hitam)	0,00	kotak
31	Catrid Printer canon 57 (warna)	0,00	kotak
32	Catrid Printer canon 47 (hitam)	0,00	kotak
33	Spidol board marker	0,00	buah
34	Spidol Permanen	0,00	buah
35	Ballpoint	0,00	pak
36	Cutter besar	0,00	buah
37	Isi Cutter besar	0,00	buah
38	Gunting	0,00	buah
39	Pembatas Kertas	0,00	bks
40	Tinta Printer hitam	0,00	btl
41	Tinta Printer biru	0,00	btl
42	Tinta Printer kuning	0,00	btl
43	Tinta Printer merah	0,00	btl
44	Pita Printer	0,00	buah
45	Stabilo	0,00	buah
JUMLAH		0,00	

B. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap adalah sebagai berikut :

1. Tanah

Nilai tanah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 344.300.000,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.457.601.800,00.

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2020	Tahun 2019
Tanah	344.300.000,00	457.601.800,00

2. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 6.221.824.845,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.053.563.845,00

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2020	Tahun 2019
Peralatan dan Mesin	6.221.824.845,00	6.053.563.845,00

a. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 6.762.385.620,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.649.083.820,00.

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2020	Tahun 2019
Gedung dan Bangunan	6.762.385.620,00	6.649.083.820,00



b. Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan irigasi dan Jaringan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 775.341.700,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 775.341.700,00.

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2020	Tahun 2019
Jalan, Irigasi dan Jaringan	775.341.700,00	775.341.700,00

a. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 29.999.400,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 29.999.400,00.

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2020	Tahun 2019
Aset Tetap Lainnya	29.999.400,00	29.999.400,00

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 24.948.000,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 0,00.

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2020	Tahun 2019
Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.948.000,00	0,00

a. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Desember 2020 adalah Rp. (5.653.119.491,03) mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo tahun 2019 Rp. (4.708.758.142,22), dengan rincian sebagai berikut :

U r a i a n	Jumlah	
	Tahun 2020	Tahun 2019
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(5.653.119.491,03)	(4.708.758.142,22)

C. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-Lain :

1. Tagihan Jangka Panjang Per 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00 atau terdapat Kenaikan (Penurunan) sebesar Rp. 0,00.
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00 atau terdapat Kenaikan (Penurunan) sebesar Rp. 0,00.
3. Aset Tak Berwujud Per 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 5.979.456,12 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 8.083.768,23.
4. Aset Lain-Lain Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 33.214.509.000,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 33.245.320.000,00 atau terdapat Kenaikan (Penurunan) sebesar Rp. 32.915.312,11.



Rincian Aset lainnya adalah sebagai berikut :

U r a i a n	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	Jumlah	%
Aset Lainnya	33.220.488.456,12	33.253.403.768,23	(32.915.312,11)	0,00
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	5.979.456,12	8.083.768,23	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	33.214.509.000,00	33.245.320.000,00	0,00	0,00
Jumlah	33.220.488.456,12	33.253.403.768,23	(32.915.312,11)	100,10

5.1.2 Kewajiban

- Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Beban, Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.
2. Utang Bunga Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.
4. Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.



5. Utang Beban Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.
6. Jangka Pendek Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

Rincian kewajiban adalah sebagai berikut :

U r a i a n	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	Jumlah	%
Kewajiban	0,00	0,00	0,00	0,00
Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

1. Utang Dalam Negeri Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.
2. Utang Jangka Panjang Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

5.1.3 Ekuitas

Ekuitas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan per 30 Desember 2020 sebesar Rp. 41.726.168.530,09 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 42.510.236.191,01.

Rincian Perhitungan Ekuitas adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2020	Tahun 2019	Jumlah	%
Ekuitas	42.106.692.311,00	42.510.236.191,00	403.543.880,01	(100,95)
Ekuitas	41.726.168.530,09	42.510.236.191,01	784.067.660,92	(101,88)

5.2 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

5.2.1 Perubahan Ekuitas

Uraian	2020	2019
EKUITAS AWAL	42.510.236.191,01	41.324.049.928,42
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.328.773.032,30)	(9.578.907.379,04)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
- Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
- Koreksi ekuitas lainnya	(20.034.421,62)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DOKONSOLIDASIKAN	7.564.739.793,00	10.765.093.641,63
EKUITAS AKHIR	41.726.168.530,09	42.510.236.191,01

5.3 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.3.1. PENDAPATAN - LRA

Pendapatan Asli Daerah Rp. 0,00

Penerimaan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Katingan terdiri dari :

Pendapatan Restribusi Daerah Rp. 0,00

Pendapatan Restribusi Daerah merupakan realisasi pendapatan dari restribusi daerah periode TA. 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Retribusi Parkir di Tepi Jalan	0,00
- Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00
- Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00
- Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00
- Restribusi Terminal	0,00
- Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan	0,00
- Retribusi Ijin Trayek	0,00
- Retribusi Leges	0,00
- Retribusi Trayek Angkutan Sungai dan Retribusi Dokumen Kapal dan Fasilitas di Bidang Angkutan Sungai	0,00
- Pendapatan Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0,00
Jumlah	0,00

5.3.2. BELANJA

Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 setelah adanya Perubahan Murni sebesar Rp. 7.564.739.793,00 terdiri dari :

2.1 Belanja Pegawai Rp. 3.611.396.352,00

Nilai tersebut merupakan jumlah total bersih Belanja Pegawai sampai dengan 30 Desember 2020 yang terealisasi dalam Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Tidak Langsung	3.220.341.352,00
- Belanja Pegawai Langsung	391.055.000,00
Jumlah	3.611.396.352,00



2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.840.984.441,00

Nilai Barang dan Jasa di atas merupakan jumlah realisasi bersih belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Katingan sampai dengan 30 Desember 2020 dalam Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Akun Belanja Modal	Jumlah
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	102.845.089,00
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	147.923.730,00
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.200.000,00
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.522.000,00
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	61.934.400,00
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.309.400,00
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	6.826.000,00
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	8.960.000,00
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	65.977.500,00
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	218.509.875,00
11.	Pembinaan Non PNS	252.000,00
12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	217.365.000,00
13.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor	28.092.447,00
14.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43.600.000,00
15.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	2.838.000,00
16.	Pembangunan Integrasi Data OPD	2.884.044.000,00



17.	Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik	1.785.000,00
	Jumlah	3.840.984.441,00

2.3 Belanja Modal Rp. 112.359.000,00

Belanja Modal di atas merupakan realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Katingan sampai dengan 30 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Akun Belanja Modal	Jumlah
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer	5.420.000,00
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	24.948.000,00
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25.000.000,00
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Personal Komputer	21.747.000,00
5.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	957.000,00
6.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Studio Visual	27.500.000,00
7.	Belanja Modal Peralatan Mesin-Pengadaan Alat Kominikasi Telephone	6.787.000,00
	Jumlah	112.359.000,00



2.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran berkenaan sampai dengan 30 Desember 2020 sebesar Rp. 1.391.714.003,00 terdiri dari :

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020
1.	Belanja Tidak Langsung	416.824.069,00
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	242.671.381,00
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.907.553,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-
5.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	728.311.000,00
	Jumlah	1.391.714.003,00

5.4 Pendapatan LO

5.4.1. Pendapatan - LO

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri atas :

5.4.1 Pendapatan LO

Uraian	Saldo Thn 2020	Saldo Thn 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN KATINGAN**

- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- PENDAPATAN TRANSFER – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bantuan Keuangan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Hibah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dana Darurat – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4.2. Beban

Beban atau biaya adalah pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan. Beban dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sbb :

1. Beban

Uraian	Saldo Thn 2020	Saldo Thn 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
BEBAN				
- Beban Pegawai – LO	3.611.396.352,00	3.742.429.727,00	(131.033.375,00)	(3,50)
- Beban Barang dan Jasa	3.840.984.441,00	4.996.096.968,00	(1.155.112.527)	(23,12)
- Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	860.181.239,30	835.128.184,04	(25.053.055,26)	3,00
- Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Lain-lain		5.252.500,00	(5.252.500,00)	(100)



2. Beban Transfer

Uraian	Saldo Thn 2020	Saldo Thn 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
- BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

Uraian	Saldo Thn 2020	Saldo Thn 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
- Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya _ LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	16.211.000,00	0,00	16.211.000,00	0,00

5.4.4 Pos Luar Biasa

Uraian	Saldo Thn 2020	Saldo Thn 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Luar Biasa – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN ANTAR MUKA LAPORAN KEUANGAN UTAMA

6.1 Penrimaan dan Belanja Dana lainnya di Luar APBD

Dalam tahun Anggaran 2020 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan sementara ini tidak ada menerima dana / barang yang bersumber dari luar APBD, baik itu berupa hibah dan lain-lain yang tidak dianggarkan di APBD.

Karena Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik masih dalam tahap membenahan dan mencari masukan dan solusi dari Dinas Komunikasi, Informatika baik dari Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi maupun di Kementrian Komunikasi dan Informatika.



BAB VII

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Penyajian atas informasi-informasi non keuangan berikut memuat hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan ini, hal-hal tersebut antara lain yaitu :

- 1). Entitas pelaporan dan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah telah berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintah juga menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.

- 2). Lokasi perkantoran Pemerintah Daerah Katingan yaitu terletak pada kompleks perkantoran Kereng Humbang, dan lokasi tersebut sangat strategis jauh dari kemungkinan banjir.



BAB VIII PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawabsan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 yang di susun menjadi laporan Keuangan Tahunan, setelah melalui perhitungan yang terperinci dan cross chek silang antara bidang-bidang terkait semoga tidak ada yang terlewatkan dalam perhitungan anggaran ini. Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, baik Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Kita maklumi bahwa perhitungan anggaran ini merupakan realisasi dari kebijaksanaan dan Peraturan yang sudah ditetapkan melalui penetapan/pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Laporan Keuangan tersebut selain ditujukan untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Undang- undang juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Kabupaten Katingan kepada Bupati Katingan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Katingan, sehingga dengan demikian Bupati dapat mengetahui sampai sejauh mana dana yang bersumber dari rakyat telah dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat itu sendiri sebagaimana telah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan

Dalam pelaksanaa anggaran 2020 tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan dan keterbatasan sehingga belum semua rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan dapat diwujudkan, walaupun untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana tersebut sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Daerah, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis operasional.



Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan diajukan kepada Bagian Keuangan dan Aset sebelum Laporan Keuangan ini disusun, kami memperoleh saran-saran yang bermanfaat dari berbagai pihak terutama dari Panitia Anggaran.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan diucapkan banyak terimakasih. Sekian.

Kasongan, 30 Juni 2021
Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik
Kabupaten Katingan,

Drs. MUHAMMAD HASRUN, MM, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP. 19610918 198803 1 012